

“NASIB HUTAN DI TENGAH PILKADA”



Ir. SRI SUWANTO, MS
KEPALA DINAS KEHUTANAN,
(Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





KONDISI UMUM



Luas 153.564 Km²



2.660.209 jiwa (2018 - BPS)

KEPADATAN PENDUDUK



17 Jiwa/km²



Panjang Pantai 750 km

11 Sungai Besar sepanjang

- Sungai Barito **900 Km**
- Sungai Katingan **650 Km**
- Sungai Kapuas **600 Km**
- Sungai Kahayan **600 Km**
- Sungai Mentaya **400 Km**
- Sungai Seruyan **350 Km**
- Sungai Lamandau **300 Km**
- Sungai Arut **250 Km**
- Sungai Sebangau **200 Km**
- Sungai Jelai **200 Km**
- Sungai Kumai **175 Km**

Suku

Dayak, Jawa, Banjar, Melayu, Madura, Sunda, Bugis, Batak, Flores, Bali dan Suku-suku lainnya

Suku Dayak di Kalimantan Tengah

Dayak Hulu

Ot Danum, Siang Murung, Taboyan, Lawangan, Dusun, dan Maanyan,

Dayak Hilir

Ngaju, Bakumpai, Mendawai, Katingan dan Sampit

BAHASA

Dayak Ngaju, Dayak Bakumpai, Dayak Maanyan, Mendawai, Dayak Ot Danum

FILOSOFI

“HUMA BETANG”

“Rumah besar” yang dihuni banyak orang dengan beragam agama dan kepercayaan tetapi tetap rukun nan damai.

Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah

- Batas utara** : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Batas timur** : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Batas selatan** : Laut Jawa; serta
- Batas barat** : Kalimantan Barat.

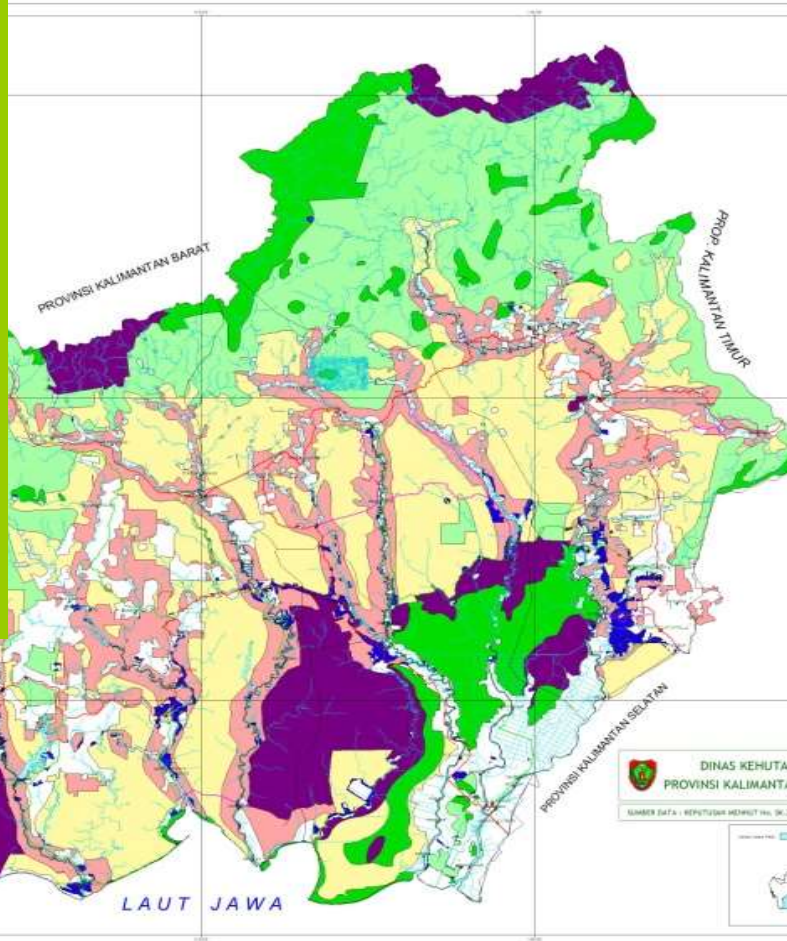


Kawasan Hutan Kalteng

Berdasarkan Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2012
Jo. KepmenLHK No. SK.8108/2018

Wilayah Administratif :

- Kota Palangka Raya
- Kab. Murung Raya
- Kab. Barito Utara
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Timur
- Kab. Kapuas
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Katingan
- Kab. Kotim
- Kab. Seruyan
- Kab. Kobar
- Kab. Lamandau
- Kab. Sukamara



1

▪ Hutan Konservasi : 1.630.828 Ha

2

▪ Hutan Lindung : 1.346.066 Ha

3

▪ Hutan Produksi Terbatas : 3.317.461 Ha

4

▪ Hutan Produksi Tetap : 3.796.785 Ha

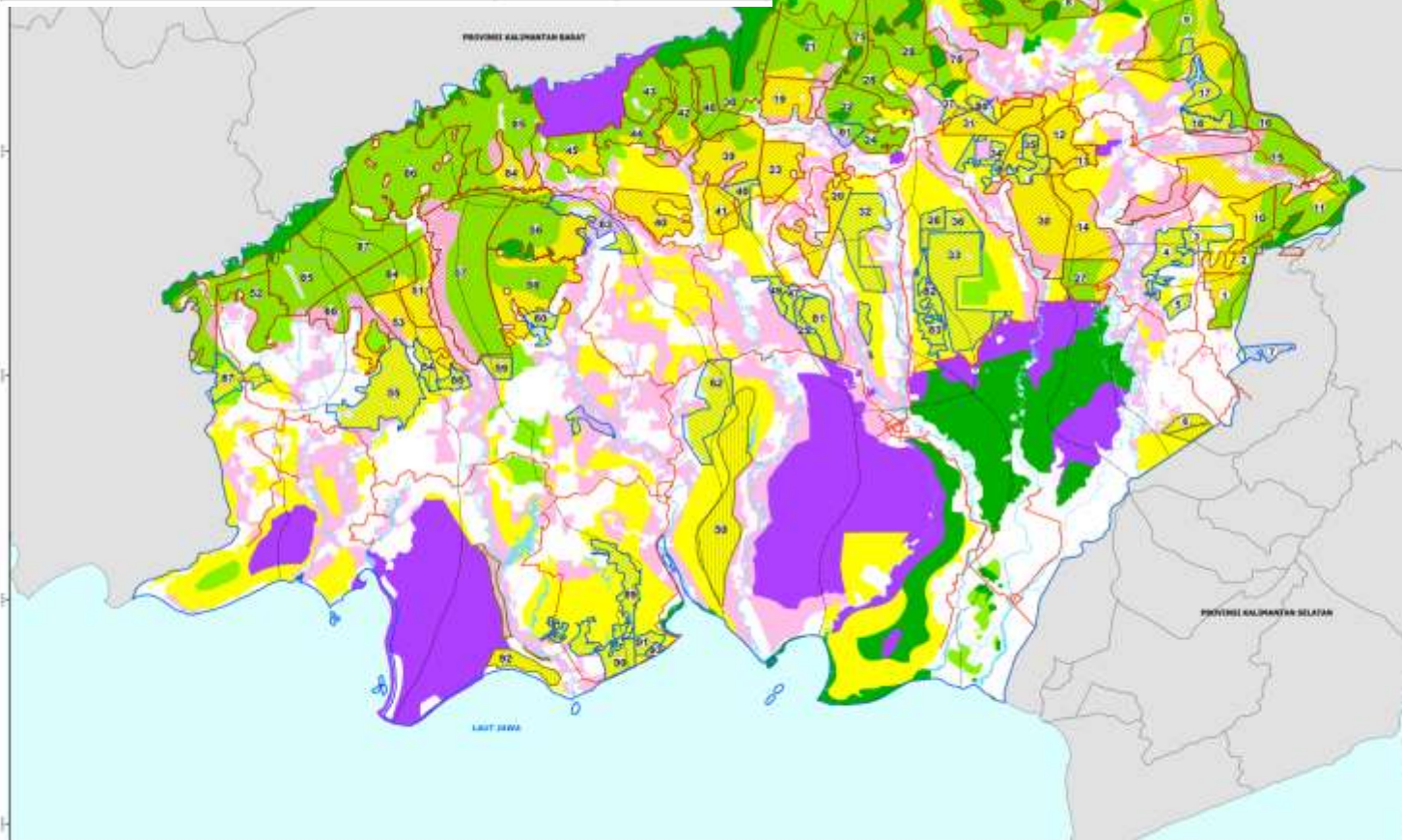
5

▪ Hutan Produksi Konversi : 2.232.595 Ha

Kawasan Hutan = 12.342.748 Ha atau sekitar 79,75% dari provinsi

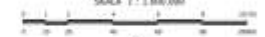
Non Kawasan Hutan (APL) = 3.134.156 Ha atau sekitar 20,25% dari provinsi

JENIS IZIN	JUMLAH	LUAS (HA)
IUPHHK-Hutan Alam (IUPHHK-HA)	57	3.981.463,49
IUPHHK-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)	33	856.280,15
IUPHHK Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)	3	164.728,77
IU Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	1	25.800
Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)	1	18
JUMLAH	95	5.028.290,41



**PETA PERKEMBANGAN
IZIN USAHA PEMANFATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN ALAM / HUTAN TANAMAN / RESTORASI EKOSISTEM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

SKALA 1 : 1.000.000



Simbol

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Desa
- Sungai
- Jalan
- Batas Kabupaten
- Batas Provinsi
- Batas Negara
- IUPHHK-HA
- IUPHHK-HTI
- IUPHHK-RE

Fungsi Kawasan

- Hutan Lindung
- Kawasan Suaka Alam / Taman Nasional
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Ekstensif

Batas wilayah administratif masih mengacu pada Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang pada wilayahnya perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku

PETA SITUASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SKALA 1 : 10.000.000



- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Desa
- Sungai
- Jalan

SUB SEKTOR PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Luas Perkebunan	2.005.710,54	Hektar
1. Kelapa Sawit	1.465.452,16	Hektar
2. Karet	445.315,66	Hektar
3. Kelapa Dalam	34.089,21	Hektar
4. Kakao	2.304,91	Hektar
5. Kopi	1.955,26	Hektar
6. Lainnya	56.593,34	Hektar



Luas Perkebunan
Kelapa Sawit
1.465.452,16 Hektar
Produksi
8.806.401 Ton CPO
Atau
41.935.243 Ton TBS

Perkebunan Rakyat
166.926 Hektar

Produksi
4.776.738,92 Ton TBS

Perkebunan Besar Swasta
1.298.526,16 Hektar

Produksi
37.158.504,08 Ton TBS

Kontribusi Kalteng dalam Produksi CPO Nasional 25,3%
Produksi CPO Nasional 34.700.000 Ton CPO/Tahun (Gapki, Agustus 2019)

SUB SEKTOR PERKEBUNAN KOMODITI KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



*	PBS Kelapa Sawit	310	Unit
-	di Lintas Kab/Kota	: 23	Unit
-	kabupaten / Kota	: 287	Unit

No	Uraian	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
*	PBS Kelapa Sawit	: 310 Unit	2.996.518,14 Ha
*	<u>PBS Kelapa sawit operasional</u>	: 182 Unit	1.730.970,20 Ha
-	PBS PMA	: 36 Unit	551.991,84 Ha
-	PBS PMDN	: 146 Unit	1.178.978,36 Ha
*	<u>PBS yang belum operasional</u>	: 128 Unit	1.265.547,93 Ha
-	PBS PMA	: 04 Unit	51.000,00 Ha
-	PBS PMDN	: 124 Unit	1.214.547,93 Ha

Materi dan Pembahasan

Pemberian izin konsesi kerap dikaitkan dengan sponsor yang diterima kandidat kepala daerah pada masa pilkada. Bagaimana realita yang dihadapi oleh para kandidat kepala daerah pada masa pilkada?

- Pemberian izin konsensi telah ada rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Investor yang mengajukan perizinan konsesi wajib memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan agar prosesnya dapat berjalan dengan baik, mudah, dan tanpa pungli.
- Pemberian izin Pemanfaatan, IPKH, TMKH, IPPKH maupun ISL merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hanya sebatas rekomendasi oleh Dinas PM dan PTSP.
- Mengenai sponsor dari izin konsensi, tergantung peluang dan mekanisme di setiap daerah. Saat ini kemungkinannya agak sulit, mengingat semua perizinan saat ini berbasis integrasi elektronik (OSS), dimana kepala daerah sekalipun sangat minim untuk tatap muka/pertemuan.
- Sebagian besar izin-izin perkebunan adalah izin lama, hampir tidak ada lagi izin baru karena adanya moratorium izin perkebunan kelapa sawit sesuai Inpres No. 08 tahun 2018 tanggal 19 September 2018.
- Pemerintah Provinsi Kalteng selalu terbuka bagi para investor, Pemerintah Provinsi Kalteng tidak anti investasi sesuai prosedur aturan dan tetap memperhatikan dampak lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah izin konsesi tersebut.

Berbagai daerah masih mengandalkan perkebunan monokultur sebagai sumber ekonomi daerahnya. Apa saja tantangan yang dihadapi kepala daerah sehingga masih mengandalkan sektor ini dan belum beralih ke sektor lain?

- Perkebunan monokultur di Provinsi Kalteng masih menjadi sektor yang diandalkan untuk pemasukan PAD, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian, pasar produk masih menjanjikan, perolehan lahan dan pengolahan masih relatif mudah, sehingga wajar bila pmdamasi mendukung untuk perkebunan monokultur ini.
- Kebijakan membuka kran investasi seluas-luasnya, membuat keputusan untuk invest komoditi apapun yg pasarnya menjanjikan tidak bisa dihalang- halangi. Bisnis Pengusaha CPO masih menjanjikan. Bila beralih ke heterokultur belum tentu untung. Pemda tidak bisa mempengaruhi pilihan investor untuk memilih komoditas, hanya fasilitator untuk mempermudah perizinan didaerah dengan pemberian insentif kemudahan berusaha, pajak, dan lain-lain.
- Tantangan yang dihadapi kepala daerah adalah ketergantungan pada produk monokultur adalah ketika ada goncangan pasar berupa isu lingkungan, produk ramah lingkungan, dan isu yang menekan produk sawit karena persaingan usaha dan pasar.
- Belum adanya alternatif pengganti dari skema ini yang mungkin lebih ramah lingkungan karena produknya multikultur, terbatasnya dukungan dana/anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun demplot perkebunan multikultur yang dapat menjadi roh model, dan belum terbukanya jalur pemasaran untuk produk dari jenis lainnya yang lebih menjanjikan bagi masyarakat dalam pengusahaan dan pengembangannya.

Inovasi apa saja yang dilakukan berbagai kepala daerah untuk mengembangkan perekonomian wilayahnya sekaligus menjaga kelestarian hutan?

- Provinsi Kalteng sebagai salah satu wilayah yang mempunyai hutan dan sumberdaya alam yang memadai, sehingga banyak produk-produk dari hasil hutan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengembangan ekonomi kreatif masyarakat sekitar hutan agar kelestarian hutan dan lingkungannya tetap terjaga.
- Inovasi yang dilakukan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk membangun ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan perekonomian. Misalnya memanfaatkan potensi HHBK berupa obat-obatan tradisional, lebah madu dan makanan khas setempat, kemudian membentuk dan mendidik kelompok masyarakat menjadi tenaga-tenaga terampil sebagai pemadam kebakaran hutan dan pemandu wisata alam..
- Untuk sektor perkebunan, Inovasi yg perlu dilakukan adalah beralih ke sektor hilir. Perkebunan sawit diharapkan tidak hanya mengirim CPO tapi juga membuka pabrik margarin, minyak goreng, dan lain-lain langsung didaerah dimana sawit berada. Disamping mencegah highcost dlm operasionalnya, juga membuka lapangan kerja baru. Bagian sawit lain yang bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, pupuk, media jamur dan lain-lain, pelan- pelan beralih ke sektor jasa dan pariwisata, jangan hanya terpaku pada SDA dan sektor primer.
- Rekomendasi yang disarankan agar masyarakat desa hutan mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pengelola kawasan hutan (KPH) dengan cara memberi kemudahan memperoleh modal usaha untuk menambah input produksi.



TERIMAKASIH



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Dinas Kehutanan

Jl. Imam Bonjol No. 1a Palangka Raya
<http://www.dishutkalteng.go.id/>

